



TARGET PERDA TERANCAM MELESET Paruh Tahun, Baru Tuntas Dua Produk Hukum

YOGYA (KR) - Target penuntasan produk hukum oleh DPRD Kota Yogya selama tahun ini terancam melewat. Pasalnya, dari total 30 produk hukum berupa peraturan daerah (perda) yang harus dituntaskan, hingga paruh tahun ternyata baru berhasil menuntaskan dua perda.

Dua perda yang sudah berhasil disahkan tersebut ialah Perda Kawasan Tanpa Rokok, dan Perda Pencabutan Perda-perda.

"Memang baru dua itu dari target Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang selesai. Tapi ada beberapa yang sudah selesai dibahas dan tinggal menunggu paripurna," tandas Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko, Minggu (2/7).

Sedangkan rancangan perda yang selesai dibahas tersebut ada tiga produk, masing-masing ialah menyangkut hak penyandang disabilitas, penanganan kebakaran, dan penanganan kawasan kumuh. Ketiga produk hukum itu hingga kini masih tertahan di Biro Hukum DIY guna fasilitasi dan evaluasi.

Sujanarko menambahkan, ketiga rancangan produk hukum itu sebenarnya sudah diajukan ke DIY sejak beberapa bulan silam. Sesuai tata kala, DIY memiliki waktu 15 hari kerja guna memberikan catatan setiap rancangan produk hukum yang diajukan oleh masing-masing kabupaten/kota.

"Nyatanya sekarang sudah dua bulan di DIY, belum juga dikembalikan ke kota. Kondisi seperti ini menjadi salah satu penghambat un-

tuk mempercepat penuntasan target Propemperda," jelasnya.

Oleh karena itu, pimpinan dewan akan meminta Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) serta panitia khusus (pansus) yang membahas produk hukum untuk melakukan koordinasi dengan Biro Hukum DIY. Namun demikian, Sujanarko memaklumi lambatnya proses fasilitasi tersebut. Hal ini lantaran Biro Hukum DIY harus mencermati setiap pro-

duk hukum di lima daerah sementara sumber daya manusia sangat terbatas.

Terkait dengan komitmen menuntaskan seluruh target Propemperda hingga akhir tahun, Sujanarko mengaku masih akan melakukan evaluasi internal. "Sangat memungkinkan target itu dirasionalisasi melalui perubahan anggaran. Misalnya ada perubahan target dan memprioritaskan produk hukum yang lebih mendesak," imbuhnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005